

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Konstitusi menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang dari daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri Urusan Pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah melalui desentralisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai pemerintah pusat yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang didasari asas otonomi.

Dari berbagai kewenangan yang didesentralisasikan ke pemerintahan daerah, maka dibutuhkan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembimbingan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan (Pemerintah Daerah Kota Tangerang, 2008). Hal itulah yang dilakukan oleh struktur organisasi inspektorat di pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pengendalian internal sangat dibutuhkan sebagai langkah awal melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah. Kelemahan pengendalian internal menjadi faktor utama peningkatan risiko pengendalian internal yang dapat memunculkan kerugian negara atau daerah antara lain penggelapan, kecurangan (*fraud*), dan tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan (Tanggulungan, 2011). Kerugian yang signifikan ini terjadi karena defisiensi pada pengendalian internal sehingga dapat menyebabkan timbulnya salah saji yang cukup material (Arens, Elder, & Beasley, 2014). Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan auditor internal agar pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga dibutuhkan sebagai dasar dalam melaksanakan audit internal.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk dalam struktur organisasi, ukuran dan metode yang dikoordinaasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keandalan dan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen (Setiawan, Sumadi, & Putra, 2021). Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, bukti audit yang direncanakan juga dapat berkurang. Sebagai bentuk dukungan penilaian atas komponen risiko pengendalian dari model risiko audit, auditor harus mengumpulkan bukti agar dapat mendukung penilaian tersebut serta dapat mendalami pengendalian internalnya. Auditor nantinya dapat memadukan bukti untuk menyediakan landasan bagi laporannya tentang efektivitas pengendalian internal. Dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2011, disebutkan bahwa inspektorat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi,

mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi walikota dalam bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008, inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya perencanaan program pengawasan; fasilitasi pengawasan dan perumusan kebijakan; pengusutan, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi tugas pengawasan; melaksanakan teknis administratif meliputi kepegawaian, administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa fungsi pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh inspektorat untuk melaksanakan pemenuhan terhadap tugas dan fungsinya karena pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan bagi kelanjutan pelaksanaan audit ke depannya. Pentingnya fungsi pengendalian internal ini membuat penulis tertarik untuk meninjau efektivitas pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal di Inspektorat Kota Tangerang Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk mempermudah penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Rumusan masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah prosedur audit yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sudah sesuai dengan ketentuan standar audit intern pemerintah dan buku panduan praktik audit internal?
2. Apakah ada kriteria dan faktor-faktor penting yang mempengaruhi penilaian efektivitas kegiatan audit internal?
3. Bagaimana strategi menghadapi adanya tantangan dan kendala saat melaksanakan audit internal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui karya tulis ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui prosedur audit yang diterapkan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan membandingkan kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan ketentuan standar audit intern pemerintah dan buku panduan praktik audit internal.
2. Mengetahui kriteria dan faktor-faktor penting yang mempengaruhi penilaian efektivitas kegiatan audit internal berdasarkan persepsi para auditor.
3. Mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi adanya tantangan dan kendala saat melaksanakan kegiatan audit internal.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Tinjauan yang dilakukan penulis mencakup efektivitas pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021. Pengambilan data

audit internal pada tahun 2021 menjadi data utama penulis dalam meninjau audit internal sesuai dengan prosedur baku yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat atau kegunaan dari tinjauan efektivitas pelaksanaan audit internal ini adalah sebagai berikut.

1. Kepentingan ilmu pengetahuan

Hasil tinjauan penulis berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan mendalam bagi pembaca terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal di lingkup pemerintahan.

2. Kepentingan masyarakat

Tinjauan penulis dapat berguna bagi peneliti selanjutnya untuk menambah referensi terkait pelaksanaan audit internal dan mendorong sifat kritis, kerja keras, dan pantang menyerah bagi setiap peneliti.

3. Kepentingan pemerintah

Penulis berharap tinjauan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan efektivitas, kualitas dan mutu audit internal di pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pelaksanaan *good governance*.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I menguraikan latar belakang, rumusan masalah sebagai landasan pembahasan, tujuan yang ingin dicapai penulis, manfaat yang ingin dibagikan

penulis kepada pembaca, dan ruang lingkup KTTA. Ruang lingkup KTTA menjadi batasan dalam penulisan karya ini dan ditutup dengan sistematika penulisan KTTA. Ruang lingkup KTTA ini adalah Inspektorat Tangsel. Secara umum, bab ini menggambarkan hal yang ingin disampaikan dari tinjauan penulis.

## BAB II LANDASAN TEORI

BAB II menjelaskan teori tentang gambaran umum dan definisi audit internal, audit internal sektor publik/pemerintah, dan hal-hal yang berpengaruh terhadap efektivitas untuk audit internal sektor publik. Bab ini juga akan memaparkan dan menjelaskan secara singkat hubungan audit internal dan eksternal, dan syarat menjadi auditor internal.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III menerangkan terkait metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan pembahasan mengenai informasi yang didapat penulis melalui objek KTTA yaitu Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Pembahasan didasari pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai penulis, landasan teori terkait peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam lingkup audit internal publik/pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## BAB IV SIMPULAN

BAB IV adalah bagian penutup dari KTTA ini dan berisi simpulan hasil tinjauan penulis terkait topik KTTA yaitu tinjauan atas efektivitas pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Bab ini juga diharapkan dapat memberi jawaban secara singkat dan cepat terkait seluruh rumusan masalah yang diangkat penulis.